

***THE ANALYSIS OF VILLAGE GOVERNMENT'S ACCOUNTABILITY AND  
TRANSPARANCY TOWARDS THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN  
LEKOPANCING VILLAGE TANRALILI DISTRICT MAROS REGENCY***

**ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA  
TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA LEKOPANCING  
KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS**

**DEWI NURMALASARI**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Makassar

Jl. A. P. Pettarani, Kampus Gunung Sari Baru, Makassar

E-mail: [dewinurmalasari161@gmail.com](mailto:dewinurmalasari161@gmail.com)

**SUMMARY**

The results of this study are the principle of accountability in the management of village funds in Lekopancing Village in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, while the principle of transparency in managing village funds in Lekopancing Village is quite in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018.

**Keywords: Accountability and Transparency in Village Fund Management.**

**RINGKASAN**

Hasil penelitian ini yaitu prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018, sedangkan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018

**Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi dan Pengelolaan Dana Desa**

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yaitu berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis.

Implementasi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Astuti, T.P dan Yulianto, 2016)

Penggunaan keuangan desa yang sedianya bertujuan untuk pembangunan desa, rawan terhadap tindakan penyelewengan dana oleh pihak-pihak tertentu. Inilah alasan mengapa masyarakat harus melaksanakan perannya sebagai pengawas langsung dan memonitor jalannya pembangunan desa. Konsep dasar

akutabilitas dan transparansi perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, guna menghindari kecurangan pada saat proses pengelolaan keuangan desa.

Desa Lekopancing merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dan merupakan satu satunya desa yang masuk dalam klasifikasi desa maju di Kabupaten Maros. Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Lekopancing masuk dalam kategori desa maju sebab kesejahteraan pada desa ini mulai meningkat dalam artian penduduk miskin mulai berkurang dan indeks pembangunan mulai merata.

Tabel 1 Rincian Dana Desa Kecamatan Tanralili Tahun 2019

No	Desa	Dana Desa	Klasifikasi
1	Allaere	Rp 908.623.000	Berkembang
2	Toddopulia	Rp 1.244.803.000	Berkembang
3	Kurusumange	Rp 1.203.617.000	Berkembang
4	Lekopancing	Rp 1.021.703.000	Maju
5	Damai	Rp 1.188.233.000	Berkembang
6	Sudirman	Rp 820.556.000	Berkembang
7	Purnakarya	Rp 981.161.000	Berkembang

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Maros No 132 Tahun 2018

Dengan adanya Dana Desa tersebut maka penulis ingin mengetahui bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lekopancing demikian penulis mengangkat judul **“Analisis akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros”**.

## METODE PENELITIAN

### Defenisi Operasional

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah daerah atas keputusan apa yang diambil. Pengambilan keputusan tidak boleh

merugikan salah satu pihak, baik pihak internal maupun eksternal seperti masyarakat.

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Variabel penelitian diukur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dengan indikator sebagai berikut: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan mengambil sembilan (9) orang responden yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Seluruh populasi akan diteliti dengan pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah Teknik dokumentasi adalah metode yang dilakukan dengan cara memperoleh laporan dan dokumen-dokumen lainnya yang erat hubungannya dengan objek

penelitian dan membaca literatur-literatur sebagai dasar teori yang akan dijadikan sebagai landasan teoritis. Dan Teknik wawancara merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam dari responden.

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif yang digunakan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros dengan cara melihat bagaimana penerapan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi menurut Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros**

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel akuntabilitas dengan menggunakan rumus IKK yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan bahwa akuntabilitas Pemerintah Desa Lekopancing dalam pengelolaan Dana Desanya sudah mencapai 100%. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Lekopancing dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dimana pengelolaan Dana Desa dilaksanakan beberapa tahap diantaranya:

#### **a. Tahap Perencanaan**

Pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Pemerintah Desa memulai dengan pembuatan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), dimana RPJMDesa ini dibuat sejak terpilihnya kepala Desa Lekopancing yang berfungsi untuk mengetahui dan menetapkan program kerja Pemerintah desa untuk satu periode. Selanjutnya berpedoman pada RPJMDesa, pemerintah Desa Lekopancing membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk mengetahui dan menetapkan program kerja Pemerintah Desa untuk satu tahun. Selanjutnya setelah penetapan RKPDesa pemerintah Desa membuat APBDesa tahun berjalan.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing Pemerintah Desa Lekopancing membuat Rekening Kas Desa, dimana Rekening kas ini berfungsi untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran Dana Desa. Untuk melakukan penarikan kas maka pemerintah Desa Lekopancing yang ditugaskan sebagai pelaksana kegiatan anggaran menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD), Rencana Anggaran Biaya Desa, dan dokumen rekomendasi pencairan yang di tandatangani oleh Camat Tanralili kemudian di sahkan oleh PMD. Setelah dilakukan pencairan, semua pelaksana yang bertugas mengelola Dana Desa harus membuat laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti yang sah.

c. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Lekopancing dilaksanakan oleh kaur keuangan dalam hal ini bendahara desa Lekopancing. Pencatatan dan pengeluaran dibukukan dalam buku kas umum yang dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

d. Tahap Pelaporan

Pelaporan pengelolaan Dana Desa di Desa Lekopancing dilakukan dengan membuat 3 (tiga) laporan dimana laporan pertama sebesar 20% yang dilaporkan pada bulan April, laporan kedua 40% yang dilaporkan pada bulan Agustus, dan Laporan ketiga 40% yang dilaporkan pada bulan

Desember. Laporan tersebut dibuat dan disampaikan kepada Bupati Maros melalui Camat Tanralili dan Dinas PMD.

e. Tahap Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Lekopancing terhadap pengelolaan dana desa yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang disampaikan kepada Bupati Maros melalui Camat Tanralili. Laporan tersebut terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa Lekopancing.

## **2. Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pemerintah Desa Lekopancing**

Pada penelitian ini, peneliti mengukur variabel transparansi dengan menggunakan rumus IKK yang berpatokan pada indikator yang telah ditentukan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dan kemudian dipresentasikan. Hasil yang ditemukan bahwa pemerintah Pemerintah Desa Lekopancing dalam pengelolaan Dana Desanya mencapai 66%. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Desa Lekopancing dalam menerapkan akuntabilitas pengelolaan dana desa cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Penerapan Transparansi di Desa Lekopancing dalam pengelolaan dana desanya ada beberapa indikator yang belum dijalankan oleh Pemerintah Desa Lekopancing dan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 diantaranya, pencatatan kas masuk dan kas keluar yang dijalankan oleh bendahara Desa belum bisa dilihat langsung oleh masyarakat, selain itu belum ada media informasi yang dapat di akses langsung oleh masyarakat umum terkait pengelolaan dana desa. Bentuk transparansi Pemerintah Desa Lekopancing terhadap pengelolaan dana desanya yaitu hanya dengan membuat papan informasi APBDesa yang di pasang di Depan Kantor Desa Lekopancing.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Lekopancing Kecamatan Tanralili Kabupaten Maros, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Pemerintah Desa Lekopancing terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan hasil analisis yang didapatkan peneliti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa lekopancing sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 yang telah dilaksanakan melalui 5 tahap diantaranya: Tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap peertanggungjawaban.
2. Transparansi pemerintah Desa Lekopancing terhadap pengelolaan dana desa berdasarkan hasil analisis yang di dapatkan oleh peneliti bahwa transparansi pemerintah Desa Lekopancing terhadap pengelolaan dana desanya cukup sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal tersebut dapat dilihat bedasarkan indikator sebagai berikut:
  - Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan membuat papan pengumuman.
  - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
  - Masyarakat terkendala untuk mengetahui realisasi penggunaan dana desa disebabkan belum adanya *website* desa sebagai media transparansi pemerintah Desa Lekopancing

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfadun, P. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Accounting*.
- Andini, H. (2018). Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Desa Sinduharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman. *Isi Skripsi*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, T.P. dan Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Bungin, P. D. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Halim, Abdul dan Muhamad, Ikbil. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Surakarta: Andi Surakarta
- Miftahuddin. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Punggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bandul. *Isi Skripsi*.
- Mursyidi. (2009). *Akuntansi Pemerintah di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Nordiwana, Deddi. 2006. *Akuntansi sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka baru

*Peraturan Bupati Maros Nomor 132 Pasal 1 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Desa*

*Peraturan Bupati Maros Nomor 132 Pasal 9 Tahun 2018 Tentang Penyaluran Dana Desa*

*Peraturan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah*

*Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK.07 Tahun 2015 Tentang Keuangan Negara*

*Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Sabeni, Arifin dan Ghozali, Imam. 2001, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintah*. Yogyakarta: BPFE

Siregar, B (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.

Sugiyono, P. D. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. *Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*.

Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas , Transparansi, dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk Mewujudkan Good

Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. *isi skripsi*.

Widjaja, P. D. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.